

ASPEK ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERBATASAN NEGARA

Anak Agung Banyu Perwita

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Katolik Parahyangan

The management of development in our border issues, which to date has not been optimal, is a crucial issue in Indonesia today. This internal problem and the possibility of neighboring countries claiming part of our national territory have increasingly turned this issue into a priority for the Indonesian government. This article discusses our limited capacity to manage and protect its boundaries which will have real impacts to both internally and externally. This article argues that the complicated character of the national border issue, which is related to various types of threat, the wider field of national security, limited resources and the perception of threats, requires a more comprehensive policy framework. Internally, the effective management of national territorial boundaries will not only strengthen nation-state building but also contribute to the creation of regional security. This can be achieved by establishing cooperation with the relevant neighboring states. But, of course, we must also be able to take cognizance of various other dimensions, such as the economic, social, legal and diplomatic fields in managing our national borders.

Keywords: ...

A. PENDAHULUAN

"Kondisi daerah perbatasan yang belum menggembirakan tidak mampu menarik perhatian pemerintah untuk memfokuskan perhatian perhatian pada masyarakat di daerah perbatasan. Bahkan pemerintah punya kecenderungan membatasi isu daerah perbatasan menjadi sekadar pada pulau-pulau terluar. Padahal di perbatasan daratan ada yang membutuhkan perhatian"¹

Pernyataan di atas secara gamblang menunjukkan problema wilayah perbatasan² Indonesia yang cukup kompleks. Pengelolaan wilayah perbatasan yang belum optimal, perkembangan ekonomi, kondisi sosial masyarakat setempat yang relatif buruk dan keamanan wilayah yang rendah menjadikan isu perbatasan negara menjadi salah satu isu hangat dan penting bagi Indonesia dewasa ini. Persoalan internal ini dan ditambah pula (kemungkinan) klaim negara-negara tetangga atas wilayah perbatasan teritorial kita semakin menjadikan isu ini sebagai prioritas utama pemerintah RI untuk mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa pada era globalisasi dewasa ini.

Buku Putih Pertahanan RI 2003, misalnya, secara tegas menyatakan RI masih memiliki sejumlah persoalan wilayah perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Berbagai persoalan wilayah perbatasan yang belum terselesaikan dengan baik tersebut adalah dengan negara-negara Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste, dan Republik Palau.³ Sejumlah persoalan wilayah perbatasan yang belum tuntas ini tentunya akan memiliki konsekwensi negatif pada berbagai dimensi keamanan nasional, seperti dimensi keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.⁴

Lalu, bagaimana kita mencermati dan memposisikan batas negara sebagai bagian penting dalam keamanan nasional dan politik luar negeri Indonesia dalam ranah hubungan internasional kontemporer ? Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan akademik pada isu manajemen perbatasan negara dan kaitannya dengan keamanan

nasional. Pembahasan akan diawali dengan melihat keterkaitan fenomena globalisasi dan eksistensi negara-bangsa yang dicirikan dengan pengelolaan batas negara sebagai simbol kedaulatan tertinggi sebuah negara-bangsa. Pembahasan juga dilanjutkan dengan mengupas isu pengelolaan perbatasan negara sebagai salah satu agenda penting keamanan nasional .

B. GLOBALISASI, BATAS NEGARA DAN KEAMANAN NASIONAL

"Borders are like agents of national security and sovereignty, and a physical record of a state's past and present relations with its neighbours"⁵

Kutipan di atas secara cukup tegas menunjukkan bahwa batas (negara) memainkan peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara dan bahkan batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara sebagai upaya membentuk tata interaksi antar negara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis. Hubungan internasional kontemporer dan agenda politik luar negeri tetap akan masih didominasi oleh persoalan tradisional batas-batas negara. Hal ini tentunya sangat terkait dengan persoalan keamanan nasional, kedaulatan teritorial dan efektifitas politik luar negeri dan bahkan diplomasi yang diperankan oleh sebuah negara.

Di sisi lain, fenomena globalisasi dengan berbagai macam aspeknya seakan meluluhkan batas-batas tradisional antar negara dan menghapus jarak fisik antarnegara. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan persenjataan telah menunjukkan pula betapa tapal batas negara menjadi sesuatu yang semakin kurang relevan dalam hubungan internasional pada era globalisasi dewasa ini. Globalisasi, menurut Anthony Mc Grew, bukan saja telah menjadikan teritorialitas di banyak negara menjadi semakin kurang relevan, melainkan juga mempertanyakan eksistensi kedaulatan teritorial yang dimiliki sebuah negara-bangsa.⁶ Ironisnya, perkembangan yang terjadi di banyak negara berkembang pada era globalisasi ini menunjukkan kondisi yang sangat berbeda.

1. Identitas dan Negara Lemah/Gagal (*Weak/Failed State*)

Dalam banyak kasus di banyak negara berkembang, persoalan batas negara yang belum dapat dikelola dengan baik bahkan juga menjadi salah satu indikator bahwa negara tersebut sangat lemah atau bahkan telah gagal (*Weak/failed state*).⁷ Hal ini, misalnya ditandai dengan ketidakmampuan negara dalam mengelola secara fisik pengelolaan wilayah perbatasannya. Selain itu, ketidakhadiran administrasi yang efektif dalam mengatur batas wilayahnya juga menjadi persoalan tersendiri yang menambah rumit persoalan batas wilayah negara.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, fenomena pembentukan kabupaten dan provinsi baru bisa dilihat pula dari mengemukanya sentimen lokalitas dengan membentuk dan bahkan menuntut pembentukan wilayah perbatasan baru. Alhasil, beberapa pemerintahan kabupaten dan atau provinsi baru kini berupaya untuk mempertegas batas wilayahnya masing-masing. Salah satu ilustrasi mengenai hal ini adalah permintaan DPRD dan pemerintah provinsi Banten kepada DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mempertegas batas wilayah kepulauan Seribu baik secara administratif.⁸ Apabila persoalan seperti di atas tidak dapat di atasi secara komprehensif, tentunya akan berdampak buruk pada integrasi nasional Indonesia dikarenakan setiap propinsi dan atau kabupaten di Indonesia akan terlibat konflik satu dengan yang lainnya terkait dengan perbatasan wilayah masing-masing. Konsekwensi terburuk dari kegagalan negara dalam memelihara wilayah perbatasan dan integritas teritorialnya secara internal adalah tercabik-cabiknya negara tersebut dalam perang sipil yang akan bermuara pada

fragmentasi dan disintegrasi nasional.⁹

Terbatasnya dan rendahnya kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya baik udara, laut dan darat juga akan memiliki dampak yang sangat dalam baik secara internal dan eksternal. Kompleksitas persoalan wilayah perbatasan ini secara tradisional bukan saja akan mendorong terjadinya *intrastate conflict/war* bahkan juga akan memicu terjadinya konflik antar negara dan *interstate war*. Hal ini dikarenakan bukan saja dipicu oleh prinsip kesatuan teritorialitas tetapi juga dipertegas oleh prinsip kedaulatan yang selama ini memang telah menjadi kepentingan pertama dan utama dari setiap negara-bangsa. Secara tradisional, setiap negara-bangsa akan siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kedaulatannya.¹⁰

Lebih jauh, Kari Laitinen juga mengungkapkan persoalan perbatasan (negara) bukan saja melulu mencakup persoalan teritorial semata, melainkan juga akan meliputi berbagai aspek kehidupan lainnya seperti sumberdaya dan kebanggaan identitas yang dalam konteks tertentu akan menjadi faktor penting terhadap kebanggaan lokal dan nasional dalam politik luar negerinya.¹¹ Pada titik ini, persoalan perbatasan akan menjadi isu yang sangat penting dalam agenda keamanan nasional. Dengan demikian, sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan akan memainkan peranan penting dalam agenda pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sementara itu dalam konteks hubungan internasional, ada banyak kasus pula yang dapat kita sebut untuk sekadar memberikan ilustrasi konflik antar negara yang berasal dari belum terselesaikannya berbagai persoalan tapal batas negara. Dengan kata lain, berbagai perkembangan hubungan internasional kontemporer dewasa ini telah membawa warna kontradiktif dalam hubungan antar aktor (baik negara maupun non negara). Di satu sisi, mengemukanya sentimen (etno) nasionalisme dan berbagai bentuk keterikatan identitas (lokal dan nasional) lainnya serta keinginan untuk mempertahankan sumberdaya (alam) semakin memperkuat pentingnya makna tapal batas. Munculnya kasus Ambalat antara Indonesia dan Malaysia adalah salah satu kasus yang dapat kita gunakan untuk memahami hal di atas.

Secara tradisional, hubungan internasional memusatkan perhatiannya pada studi mengenai pola-pola politik luar negeri yang membentuk hubungan antar aktor negara yang diikat oleh batas-batas teritorial/kewilayahan. Ruang teritorial yang dimiliki oleh negara ini kemudian akan menentukan kedaulatan, power dan bahkan keamanan yang dimiliki oleh negara.¹² Oleh karenanya, batas dan luas teritorial memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan eksistensi suatu negara. Gagasan utama dari penentuan batas teritorial ini adalah untuk membedakan negara secara fisik. Selain itu, batas negara juga menjadi alat untuk mengontrol aliran barang, gagasan, dan bahkan ideologi.

Agar dapat mengontrol hal di atas dalam sebuah ruang geografi, sebuah unit negara akan membutuhkan kekuatan militer yang sekaligus pula akan berfungsi untuk melindunginya dari kemungkinan gangguan kedaulatan berupa ancaman militer yang berasal dari lingkungan eksternalnya. Gagasan untuk melindungi keamanan batas wilayahnya (*security border*) bersandar pada pemikiran Realisme klasik yang sangat menekankan *self-help system*. Dengan kata lain, konsep security border akan membawa konsekwensi pada kemampuan penangkalan (*deterrence*), kekuatan angkatan bersenjata (*military forces*) dan dilema keamanan (*security dilemma*) dalam interaksinya dengan aktor negara lainnya.

Bahkan bagi Realist klasik seperti Hans. J Morgenthau, kepentingan keamanan nasional yang sangat fundamental adalah “*to protect [its] physical, political, and cultural identity against encroachments by other nations*”¹³. Lebih jauh, setiap Negara-bangsa harus

mencapai kepentingan nasionalnya '*defined in terms of power*' untuk melindungi keamanannya (*security*) wilayahnya dan kelangsungan hidupnya (*survival*). Dalam argumen Realisme, kepentingan nasional memainkan peranan yang sangat krusial dimana melalui konsep ini, kebutuhan keamanan suatu aktor Negara-bangsa memiliki kaitan yang sangat erat antara kedaulatan negara dan karakteristik sistem internasional, seperti anarki dan distribusi power, dengan semua kebijakan luar negeri dan tindakan yang diambil aktor Negara.

Namun, persoalan batas negara dan keamanan nasional akan memunculkan wajah berbeda di kebanyakan negara-negara berkembang. Studi yang dilakukan Robert I. Rotberg secara eksplisit mengindikasikan salah satu karakteristik penting dari negara gagal (*failed states*) adalah ketidakmampuannya dalam menyelesaikan persoalan batas negara yang kemudian mendorong terjadinya *intra* dan *interstate war* secara hampir bersamaan.¹⁴ Penataan dan pengelolaan batas-batas negara secara lebih baik, dengan demikian, akan menjadi prasyarat utama bagi upaya menciptakan sebuah negara kuat (*strong state*)¹⁵.

Di sisi lain, sebagaimana diutarakan Georg Sorensen, persoalan terbesar untuk menciptakan sebuah keamanan nasional dan negara kuat justru kerap kali terhambat oleh keterbatasan kemampuan, kalau tidak dikatakan ketidakmampuan, Negara dalam mengelola administrasi dan manajemen berbagai aspek kehidupan nasionalnya, termasuk wilayah perbatasan negara. Hal ini terutama ditunjukkan oleh agenda negara yang sangat disibukkan dengan berbagai persoalan domestik termasuk mempertahankan rejim pemerintahan semata, dan kemampuan yang terbatas dalam mengelola kondisi ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan negara (termasuk di dalamnya untuk menjaga semua perbatasan negara dan wilayah teritorialnya).¹⁶ Sehingga tidaklah mengherankan apabila kita memperoleh informasi bahwa sebagian besar penyelundupan dan pencurian sumber daya alam kita begitu tinggi dan merebaknya kasus penjualan beberapa pulau yang bahkan dilakukan oleh pemerintah daerah dikarenakan lemahnya administrasi dan pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut kita.

2. Keamanan Militer dan Non Militer dalam Isu Perbatasan Negara Indonesia

Bagi banyak negara berkembang, seperti Indonesia misalnya, isu perbatasan negara dan keamanan nasional kerap menjadi persoalan yang sangat dilematis. Aspek pertahanan yang merujuk pada kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman militer yang berasal dari lingkungan internasional akan berbaur dengan aspek ancaman non militer. Tidak seperti negara-negara maju lainnya, negara-negara berkembang harus menghadapi sekaligus berbagai isu pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik yang begitu rumit dan terkait erat dengan stabilitas internal serta kemampuan aspek pertahanan negara untuk melindunginya dari berbagai kemungkinan ancaman militer yang berasal dari lingkungan eksternal.

Dalam banyak kasus di negara-negara berkembang, berbagai isu pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik domestik di atas akhirnya menjadi bagian tidak terlepaskan dari isu pertahanan dan keamanan negara. Bahkan, isu-isu di atas termasuk pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari *domestic vulnerabilities* yang kerap mendominasi agenda pembangunan keamanan nasional sehingga kemudian diterjemahkan pula sebagai obyek utama pertahanan negara.

Dipandang dari sisi penjelajahan literatur akademik, berbagai persoalan yang terkait satu sama lain seperti di atas telah menunjukkan signifikansi isu-isu non militer terhadap kemampuan melindungi keamanan nasional.¹⁷ Selain itu, negara gagal (*failed State*) yang tidak dapat melindungi wilayah perbatasannya akan menghadapi berbagai persoalan

ketidakamanan wilayah perbatasannya yang muncul dari aktor non negara seperti kelompok penjahat transnasional (*transnational organized crime*) --yang menjalankan aksi kejahatan seperti perdagangan narkotika, perdagangan manusia, penyelundupan barang dan manusia serta pencucian uang (*money laundering*)-- dan kelompok teroris yang kerap memanfaatkan lemahnya kontrol wilayah perbatasan untuk merencanakan, mempersiapkan dan menggalang semua aksi terorismenya.¹⁸

Salah satu ilustrasi terkini mengenai keterkaitan antara kejahatan transnasional dan aktivitas terorisme yang memanfaatkan wilayah perbatasan yang tidak terkontrol dengan baik adalah digunakannya wilayah perbatasan Thailand, Malaysia dan Singapura oleh kelompok teroris dalam merancang, mempersiapkan dan melaksanakan aktivitas terorisme di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini.¹⁹ Wilayah perbatasan di Thailand Selatan melalui provinsi Satun ke Sumatera (kepulauan Riau) melalui perairan Malaysia di sekitar Langkawi-Penang merupakan jalur darat dan laut favorit yang digunakan untuk mengalirkan dana, peredaran senjata, dan bahan peledak para pelaku terorisme untuk merancang aktivitas terorisme. Selain itu wilayah perbatasan Filipina Selatan dari Zamboanga dan Davao (Mindanao), menuju kepulauan Sulu menuju ke Sarawak dan Nunukan di Kalimantan serta Kepulauan Sangihe Talaud di Sulawesi Utarana menuju Maluku dan Sulawesi Tengah ditengarai pula menjadi jalur penyaluran senjata dan manusia untuk melakukan kegiatan terorisme di wilayah timur Indonesia.²⁰ Melihat contoh kasus di atas, tidaklah berlebihan bila Harian The New York Times menyatakan bahwa, "*Failed states that cannot provide jobs and food for their people, that have lost chunks of territory to warlords, and that can no longer track or control their borders, send an invitation to terrorists*".²¹ Dalam konteks ini, lemahnya kontrol terhadap wilayah perbatasan akan menjadi faktor pengganggu dalam diplomasi perbatasan yang harus Indonesia lakukan dengan beberapa negara tetangga. Dengan kata lain, hal ini akan menjadi titik lemah dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Pengalaman banyak negara berkembang yang cenderung lemah (*weak*) atau gagal (*failed*) tentang kompleksitas aktor dan isu militer dan non militer seperti tingkat pembangunan yang belum merata terutama di wilayah perbatasan, *overpopulation*, kejahatan lintas batas negara, degradasi lingkungan, dan persoalan sosial budaya, merupakan sumber ketidakamanan nasional dan sekaligus menjadi sumber masalah dalam politik luar negeri. Sebagaimana dikatakan Caroline Thomas,

*"(national) security in the context of the third Worlds does not simply refer to the military dimension, as it often assumed in the Western discussion of the concept, but to the whole range dimensions of a state's existence which have been taken care of in the more developed states, especially those in the West"*²².

Sebuah ilustrasi sederhana tentang hal ini, misalnya, dapat ditemukan dalam dua buah berita berbeda yang dimuat di sebuah harian nasional. Harian Kompas (10 Maret 2006) mengetengahkan sebuah berita yang bertajuk "Keamanan RI Jadi Isu Utama". Berita ini mengupas keengganan para investor Jepang untuk menanamkan modalnya dikarenakan ketidakstabilan keamanan dan kondisi sosial di Indonesia. Sementara dalam sebuah berita lain pada harian yang sama dan tanggal yang sama pula, terdapat sebuah berita bertajuk "Pos TNI di Pulau Terluar Papua" yang memberitakan upaya Kodam Trikora untuk membangun pos militer untuk mengamankan pulau-pulau terluar dari kemungkinan klaim dan atau ancaman militer pihak luar. Selain itu, ditengarai pula wilayah perbatasan ini merupakan jalur lalulintas utama dari penyelundupan, pencurian kayu dalam jumlah besar (*illegal lodging*) dan sumber daya kelautan lainnya (*illegal fishing*).²³

Tentu saja makna kata keamanan dalam berita pertama dan kedua memiliki perbedaan yang sangat tajam. Bila berita pertama dimaksudkan untuk melihat kondisi riil keamanan

sosial domestik kita sehingga upaya yang patut dilakukan untuk mengundang investor asing membutuhkan beragam kebijakan non militer seperti ekonomi, hukum dan sosial budaya, maka pada berita kedua secara tegas mengacu pada aspek pertahanan wilayah teritorial kita dari kemungkinan klaim dan ancaman (militer) yang datang dari lingkungan eksternal kita. Olehkarenanya, membutuhkan respon yang bersifat militer pula untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia. Namun tentunya patut pula kita akui bahwa respon militer semata tidaklah memadai. Diperlukan pula respon-respon lainnya termasuk aspek ekonomi, hukum, sosial budaya dan diplomasi untuk mendukung upaya melindungi kedaulatan teritorial kita.

Tingkat kerawanan di banyak negara berkembang semakin menjadi lebih tinggi tatkala berbagai persoalan di atas diperumit dengan berbagai persoalan lainnya seperti terbatasnya kapasitas sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan institusional (termasuk kekuatan militernya). Oleh karenanya, isu perbatasan negara dan keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari ancaman-ancaman militer dan non militer. Alhasil, pengelolaan dan pengawasan keamanan seluruh wilayah perbatasan akan mencakup berbagai dimensi baik militer, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan politik.

C. PENUTUP

Rumitnya persoalan perbatasan negara yang kita miliki sekarang ini yang ditandai dengan beragam aspek seperti jenis ancaman, sifat ancaman, obyek keamanan nasional yang semakin meluas, keterbatasan sumber daya, persepsi ancaman yang juga begitu beragam, pendekatan dan instrumen kebijakan yang kita miliki, akan selalu mendorong kita untuk dapat membahasnya secara berkelanjutan dengan lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan kita tidak saja dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arti penting berbagai hal di atas, melainkan juga dapat menghasilkan perangkat sistem dan kebijakan nasional yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan perbatasan wilayah negara dan keamanan nasional kita secara lebih lengkap dan utuh pula.

Secara internal, pengelolaan dan pengawasan semua (batas) teritorial bukan saja hanya akan memperkuat *nation-state building* tapi juga akan mendorong terciptanya *regional security building*. Hal ini, misalnya, dapat diupayakan dengan melakukan kerjasama dengan semua negara tetangga yang memiliki perbatasan wilayah dengan kita. Namun tentunya, sebelum hal ini dapat dicapai, sekali lagi, kita harus mampu melibatkan berbagai dimensi seperti ekonomi, dan sosial, hukum, dan diplomasi dalam mengelola wilayah perbatasan kita.

Meminjam kata-kata Rizal Sukma, pengelolaan wilayah perbatasan negara dan keamanan nasional Indonesia yang menyeluruh harus melibatkan empat komponen yang terintegrasi dalam sebuah kerangka kebijakan yang utuh, yakni : *Development, Democracy, Diplomacy and Defence*.²⁴ Egoisme sektoral yang tinggi untuk memisahkan berbagai komponen di atas dalam pengelolaan wilayah perbatasan, teritorial dan keamanan nasional kita hanya akan menjadikan Indonesia sebagai negara-bangsa yang terseok-seok dalam merespon berbagai perubahan baik yang terjadi dalam konteks lokal, nasional maupun global.

¹ Pernyataan ketua Umum Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir sebagaimana dikutip dari harian KOMPAS, "Isu Perbatasan Bukan Hanya Pulau Terluar", 13 Februari 2006.

² Dalam khasanah konseptual, istilah ini kerap merupakan terjemahan dari istilah *frontier*, *boundary* dan *border*.

Menurut Duska Knecevic Hocevar, ketiga istilah ini sering dimaknakan sama, yakni sebuah garis perbatasan wilayah antar negara berdasarkan hukum internasional. Sejatinya, ketiga istilah ini memiliki makna berbeda

- yang tidak hanya mencakup ruang geografis tetapi juga bermakna simbolik, etnisitas, dan politik. Lihat Duska Knecevic Hocevar (2000) *Studying International Borders in Geography and Anthropology: Paradigmatic and Conceptual Relations*. Dalam Geografski Zbornik. Vol.30, hlm.85-92
- ³ Lihat buku putih pertahanan RI, Ministry of Defence (2003). *Defending The Country Entering the 21st Century*. Jakarta: Ministry of Defence, hlm.24-25.
- ⁴ Pembahasan lebih lanjut mengenai lima dimensi keamanan ini, lihat Barry Buzan (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- ⁵ Lihat Kari Laitinen (2004). *Reflecting the Security Border in the Post-Cold War Context*, dalam http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol6_2/Laitinen.htm, accessed 25 jan 2006.
- ⁶ Lihat misalnya, Anthony McGrew (2000). Power Shift: From National Government to Global Governance. Dalam David held ed. *A Globalizing World ?: Culture, Economics and Politics*. London: Routledge, hlm.127-168.
- ⁷ Lihat Stewart Patrick (2006). Weak States and Global Threats: Fact or Fiction. Dalam *The Washington Quarterly*, Vol.29, No.2, hlm.27-53.
- ⁸ Lihat "Banten Minta batas Wilayah Kepulauan Seribu", harian KOMPAS, 28 Maret 2006.
- ⁹ Lihat misalnya, Julian Saurin (1995) The End of International Relations ? The State and International Theory In The Age of Globalization. Dalam John MacMillan, Andrew Linklater. *Boundaries In Question: New Directions In International Relations*. London: Pinter Publishers, hlm. 244-261.
- ¹⁰ Mengenai dinamika konsep kedaulatan, lihat misalnya Daniel Philpott (2001). *Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations*. New Jersey: Princeton University Press, hlm.5-10.
- ¹¹ Lihat Kari Laitinen (2004).ibid.
- ¹² Mengenai hal ini lihat misalnya Mike Bowker, Robin Brown (1993). *From Cold War to Collapse: Theory and World Politics In The 1980s*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm.2.
- ¹³ Dikutip dalam Jutta Welsch (1996). Constructing National Interests. Dalam *European Journal of International Relations*. Vol.2. No.3, hlm.275-318.
- ¹⁴ Robert I. Rotberg (2004). The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair. Dalam Robert I. Rotberg ed. *When States Fail: Causes and Consequences*. New Jersey: Princeton University Press, hlm.1-50.
- ¹⁵ Merujuk pada penjelasan Sorensen, negara kuat ditunjukkan dengan institusi dan mekanisme politik yang sudah matang, kinerja ekonomi yang baik, pengelolaan wilayah teritorial yang baik, tata kelola pemerintah yang juga baik, dan identitas nasional yang kuat. Lihat Georg Sorensen (1996) Individual Security and National Security: The State Remains the Principal Problem. Dalam jurnal *Security Dialogue*. Vol27. No.4. hlm.375-390.
- ¹⁶ Ibid.
- ¹⁷ Lihat misalnya, Richard Ullman (1983). Redefining Security. Dalam *International Security*. Vol.8.No.1, Ole Waever (1989). *European Security-Problems of Research on Non-Military Aspects*. Copenhagen Papers No.1. Copenhagen: University of Copenhagen, , Barry Buzan (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, Helga Haftendorn (1991). The Security Puzzle: Theory Building and Discipline in International Security. Dalam *International Studies Quarterly*. Vol. 35. No.1, Muthiah Alagappa (1998). *Asian Security Practice: Material and Ideational Practices*. California: Stanford University Press, Benyamin Miller (2001). The Concept of Security: Should it Be Redefined. Dalam *The Journal of Strategic Studies*. Vol.24.No.2, Sean Kay (2004).Globalization, Power and Security. Dalam *Security Dialogue*. Vol.35. No.1.
- ¹⁸ Lihat Elke Krahmann (2005). From State to Non-State Actors: The Emergence of Security Governance. Dalam Elke Krahmann. *New Threats and New Actors in International Security*. New York: Palgrave MacMillan, hlm. 3-20.
- ¹⁹ "Terorisme: Segitiga Maut Indonesia-Malaysia-Thailand", harian KOMPAS, 1 April 2006.
- ²⁰ Ibid
- ²¹ Sebagaimana ditulis harian New York Times, July 2005. Dikutip dalam Stewart Patrick (2006), hlm.34. Penegasan kata-kata tebal dilakukan oleh penulis untuk kepentingan makalah ini.
- ²² Dikutip dari Caroline Thomas (1991). *New Directions in Thinking about Security in the Third World*. Dalam Ken Booth ed. *New Thinking about Strategy and International Security*. London: Harper Collins Academic.hlm.269.
- ²³ Lihat Harian KOMPAS, 10 Maret 2006, hlm. 21 dan 25.
- ²⁴ Rizal Sukma (2005) War will never solve our problem, dalam The Jakarta Post, 21 Maret 2005.

Daftar Riwayat Hidup Singkat

Anak Agung Banyu Perwita, lahir di Jakarta, 6 Februari 1967, adalah Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, di jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Katolik Parahyangan. Memperoleh gelar S-1 dari Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UNPAR (1991), MA in International Relations and Strategic Studies, Lancaster University-Inggris (1994) melalui beasiswa *British Chevening Awards-British Council*, dan Ph.D dari Flinders University- Australia dalam *Asian Studies* (2002) melalui beasiswa *Australian Development Scholarships* (ADS). Kini juga menjabat sebagai Wakil Rektor bidang Hubungan dan Kerjasama, Universitas Katolik Parahyangan.

Beberapa *Awards/fellowships* untuk penelitian yang diterima selama ini adalah :

- *Endeavour Indonesia Research Fellowship*, AusAID (2007)
- *DAAD Visiting Fellow*, di *International Relations and Foreign Policy Studies, Institute of Political Sciences*, Giessen University-Jerman (November-Desember 2005).
- *Visiting Fellow*, di *Clingendael Institute of International Relations*, Denhaag-Belanda (Maret 2004).
- *Fullbright fellow* di *University of Southern Carolina, Columbia-AS* (Juni-Agustus 2003)
- *Asian Visiting Fellow*, di *Nordic Institute of Asian Studies (NIAS)*, Copenhagen-Denmark (Februari-Maret 2003).

Beberapa karya tulis/akademik terakhir (2007) adalah :

1. Politik Luar Negeri Indonesia dan Dunia Muslim. Bandung: UNPAR Press. ISBN: 978-979-1431-05-7
2. Indonesia and the Muslim World: Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond. Copenhagen: NIAS Press. ISBN 13-978-87-91114-92-2.
3. Redefinisi Konsep Keamanan: Pandangan Realisme dan Neo Realisme Kontemporer. Kontributor dalam buku "Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi". Editor: Yulius P.Hermawan. Yogyakarta: PT Graha Ilmu. ISBN: 978-979-756-201-4.

Selain itu juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar/konferensi baik di dalam dan luar negeri serta menjadi contributor di berbagai jurnal ilmiah seperti Jurnal Analisis-CSIS dan *The Indonesian Quarterly-CSIS*, jurnal Luar Negeri, Deplu RI, Jurnal SATRIA: Studi Pertahanan-DepHan RI dan beberapa media cetak nasional seperti harian KOMPAS, The Jakarta Post, Jurnal Nasional, Sepatu Indonesia, Harian KONTAN, Majalah Mingguan Gatra dan Sinar Harapan. Aktivitas lainnya adalah:

- Dosen Seskoad-TNI, Bandung.
- anggota Kelompok Kerja Reformasi Sektor Keamanan-Pro Patria,
- Board of Advisory Council, Institute of Defence and Security Studies (IODAS), Jakarta.
- Overseas Member, Centro Argentino Estudes de Internacionale (CAEI), Argentina.
- Nasarumber pada berbagai pertemuan Kelompok Ahli Politik Luar Negeri RI, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Departemen Luar Negeri RI, Badan Pendidikan dan Latihan-Departemen Pertahanan RI, Dewan Ketahanan Nasional dan Biro Hubungan Internasional-Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI.